

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja didefinisikan sebagai individu yang sedang mengalami fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Ini merupakan periode peralihan yang dialami oleh manusia setelah masa anak-anak, yang biasanya terjadi pada rentang usia sekitar 12-13 hingga sekitar 20 tahun. Transformasi yang terjadi selama masa remaja mencakup perubahan signifikan dalam aspek-aspek perkembangan, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan watak atau kepribadian (Gunarsa, 2006: 196).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (BKKBN, 2015).

Kenakalan remaja merujuk pada perilaku negatif atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau hukum, umumnya dilakukan oleh individu yang berusia remaja. Perilaku ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar remaja, hingga perilaku merusak atau mengganggu ketertiban umum.

Kenakalan anak mencakup perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana, serta pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan

tersebut dilakukan oleh anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun (Simanjuntak dalam Sumiyanto, 1994:22).

Tawuran merujuk pada perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat khususnya para remaja, tawuran juga salah satu dari kenakalan remaja. Tawuran pun sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena tawuran sendiri masih kerap terjadi. Tawuran antar remaja kini pun sudah semakin meresahkan karena menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tawuran juga dapat mengakibatkan luka serius bahkan di beberapa kasus terdapat korban jiwa dalam aksi tawuran.

Di wilayah Pasar Minggu, situasi kenakalan remaja khususnya terkait tawuran menjadi salahsatu perhatian utama pihak berwenang. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah sosial di tengah perkembangan kota yang pesat. Tawuran remaja seringkali terjadi sebagai ekspresi dari berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Para remaja terlibat dalam aktivitas yang merugikan, mengancam keamanan masyarakat, dan menciptakan ketidaknyamanan

Tawuran merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berpotensi membahayakan masyarakat. Terlebih lagi, tawuran yang dilakukan oleh para remaja, yang seharusnya menjadi agen perubahan untuk masa depan Indonesia, namun malah terjerumus ke dalam tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat ke

arah yang lebih ideal, dengan ciri ketertiban, keamanan, dan kedamaian, peran Polri menjadi sangat diperlukan. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran polisi dalam penanganan kenakalan remaja terkait tawuran sangat penting karena mereka memiliki kewenangan dan keahlian dalam melakukan penindakan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu kepolisian daerah, kepolisian resor, dan kepolisian sektor. Kepolisian sektor merupakan unit terkecil dari kepolisian yang bertugas langsung di wilayah Kecamatan. Dalam hal ini, Polsek Pasar Minggu merupakan kepolisian sektor yang bertugas di Kecamatan Pasar Minggu. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polri. Terutama dalam era globalisasi dan modernisasi yang serba cepat, kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, serta tuntutan kehidupan yang semakin tinggi, menyebabkan banyak permasalahan sosial yang timbul, termasuk di dalamnya adalah kenakalan remaja terkait tawuran.

Polsek Pasar Minggu sendiri memiliki tugas pokok yang merujuk pada undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Polsek bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Mereka melakukan patroli rutin, merespons panggilan darurat, menangani gangguan keamanan, mengendalikan kerumunan, dan menangani konflik serta kejahatan yang terjadi di wilayahnya.
2. Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan: Polsek memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah investigasi untuk mengungkap pelaku kejahatan dan mengajukan mereka ke proses peradilan.
3. Penegakan Hukum: Polsek bertugas menegakkan hukum dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Mereka melakukan penangkapan terhadap tersangka, mengamankan barang bukti, dan menyelenggarakan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan dan Bantuan Masyarakat: Polsek memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai hal terkait keamanan dan penegakan hukum. Mereka memberikan informasi, petunjuk, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

masyarakat. Selain itu, mereka juga memberikan perlindungan dan pengawalan pada acara- acara tertentu. Untuk menjalankan tugas pokok di atas Polsek Pasar Minggu memiliki struktur organisasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri.

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan kenakalan remaja dengan menciptakan kerangka hukum yang khusus mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan hukum yang relevan. UU SPPA menetapkan pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang terlibat tindak pidana, mengutamakan perlindungan hak anak, dan pembinaan sebagai alternatif utama daripada hukuman pidana. Meskipun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum pidana umum.

Pasal 81 UU SPPA memberikan pengecualian di mana anak dapat dikenakan sanksi pidana jika terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat. Dalam konteks tawuran remaja, sanksi pidana dapat mencakup ketentuan pidana umum yang mengatur tindak kekerasan atau penganiayaan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polsek Pasar Minggu memiliki peran yang sangat penting sebagai *stakeholder* dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Dalam konteks kenakalan remaja, tawuran seringkali menjadi masalah yang memerlukan intervensi cepat dan tegas. Polsek Pasar Minggu berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antar remaja dan mencegah tindakan kekerasan yang dapat merugikan semua pihak. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada remaja yang terlibat, dengan harapan dapat mengubah perilaku negatif menjadi positif. Dengan keterlibatan aktif kepolisian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan positif para remaja di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian di Polsek Pasar Minggu berupaya mengatasi masalah ini melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Tindakan preventif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh polisi merupakan langkah-langkah penting dalam menangani kenakalan remaja. Dalam hal preventif (pencegahan), polisi aktif melakukan patroli, memantau wilayah, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko perilaku kriminal remaja. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi kemungkinan konflik yang bisa memicu kenakalan remaja. Polisi juga terlibat dalam tindakan rehabilitatif. Mereka berusaha membimbing dan mendukung remaja yang terlibat dalam perilaku negatif.

Program rehabilitasi ini melibatkan pelatihan keterampilan, konseling, atau kegiatan positif lainnya yang membantu remaja mengubah perilaku mereka.

Pendekatan yang mencakup pencegahan dan rehabilitasi memungkinkan polisi berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman serta membantu remaja menemukan arah positif dalam hidup mereka. Evaluasi terhadap sejauh mana kedua pendekatan ini efektif menjadi kunci untuk terus meningkatkan cara polisi menangani kenakalan remaja.

Iptu Mamay selaku Kepala Unit Bina Masyarakat (Binmas) di Polsek Pasar Minggu, menjelaskan bahwasannya sekarang Polri memiliki layanan *Call Center* 110 sebagai inovasi terkini dalam pencegahan tindak pidana. Layanan ini, yang bebas biaya, merupakan langkah yang memungkinkan polisi merespons aduan masyarakat terkait tindak pidana atau kegiatan yang meresahkan dengan lebih efektif. Melalui *Call Center* 110, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kejadian tersebut hanya dengan melakukan panggilan telepon, tanpa dikenakan biaya. Sistem ini memungkinkan panggilan dari masyarakat langsung terhubung ke Polda, yang selanjutnya menyalurkan aduan ke tingkat Polres dan akhirnya diserahkan kepada Polsek terdekat dari wilayah keluhan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat respons pihak kepolisian, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. *Call Center* 110 tanpa biaya, Polri menunjukkan komitmen

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

Penting juga bagi Polsek untuk bekerja sama dengan keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat. Ini dilakukan agar bisa bersama-sama menangani masalah kenakalan remaja terkait tawuran. Polsek akan membantu menjaga ketertiban dan memberikan sanksi jika diperlukan, sementara keluarga, sekolah, karang taruna, dan lembaga masyarakat dapat membantu memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan kepada remaja yang terlibat. Sehingga diharapkan sinergi antara semua pihak mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan positif remaja di wilayah tersebut.

Iptu Mamay, Kepala Unit Binmas di Polsek Pasar Minggu, menjelaskan bahwa Polsek tersebut berkolaborasi dengan Poskamling di wilayah Pasar Minggu dalam kegiatan patroli. Poskamling, sebagai pos keamanan lingkungan, menjadi bagian penting dari strategi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Pasar Minggu. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antara Polsek dan masyarakat setempat, bertujuan mencegah potensi tindak kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga. Melibatkan Poskamling, Polsek Pasar Minggu dapat lebih efektif memantau situasi, memberikan respon cepat terhadap kejadian mencurigakan, serta membangun keterlibatan positif dengan masyarakat guna meningkatkan keamanan bersama.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pasar Minggu sering menjadi lokasi tawuran. Fenomena ini semakin terbukti melalui berbagai artikel yang menyoroti penangkapan remaja yang terlibat dalam kekerasan tersebut, menunjukkan respons aktif dari pihak kepolisian di Polsek Pasar Minggu yang dibantu oleh Polres Jakarta Selatan telah mengambil langkah-langkah hukum untuk mengendalikan keadaan.

Gambar 1.1

Artikel yang Membahas Terjadinya Tawuran di Wilayah Pasar Minggu



Sumber: Noviansah, W. (2023, Oktober 8). 6 Remaja Bersajam Diamankan Polisi Usai Tawuran di Pasar Minggu Jaksel. Detik News. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6971174/6-remaja-bersajam-diamankan-polisi-usai-tawuran-di-pasar-minggu-jaksel>



Murti, A. S. (2023, Oktober 1). Tepergok Bawa Celurit, 2 Remaja di Pasar Minggu Ditangkap Sepulang Tawuran. i.news.id. Diakses dari <https://www.inews.id/news/megapolitan/tepergok-bawa-celurit-2-remaja-di-pasar-minggu-ditangkap-sepulang-tawuran>



Rahmat, K. N. (2022, Oktober 2). 11 Remaja Ditangkap karena Hendak Tawuran di Pasar Minggu, Bawa Celurit dan Arit. Medcom.id. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/metro/aNrxOY2k-11-remaja-ditangkap-karena-hendak-tawuran-di-pasar-minggu-bawa-celurit-dan-arit>

Penangkapan remaja yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut menjadi bukti nyata bahwa masalah ini memerlukan penanganan serius. Upaya penegakan hukum, dilengkapi dengan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif, diharapkan dapat mengubah dinamika negatif yang melibatkan remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai di wilayah tersebut

Struktur organisasi Polsek Pasar Minggu telah dirancang dengan keberadaan unit-unit khusus yang memainkan peran strategis dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran. Ada tiga unit utama yang terlibat dalam upaya ini, yaitu Binmas (Bina Masyarakat), Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan Samapta (Satuan Pengamanan dan Ketertiban)

Iptu Mamay selaku kepala unit Binmas menjelaskan kalau unit Binmas memiliki peran kunci dalam membangun hubungan positif antara kepolisian dan masyarakat. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan pencegahan kenakalan remaja, memberikan penyuluhan kepada remaja, dan merancang program-program komunitas guna mengurangi potensi tawuran. Di sisi lain, unit Binmas memiliki unit di bawahnya, yaitu unit Bhabinkamtibnas berfungsi sebagai jembatan komunikasi langsung antara Polsek dan masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks kenakalan remaja, Bhabinkamtibnas menjadi penghubung yang memberikan pendampingan dan melaksanakan kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya tawuran.

Sebagai Kepala Unit Samapta di Polsek Pasar Minggu, AKP Sulaimansyah menjelaskan bahwa tugas utama unitnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan represif, termasuk menanggapi tawuran, kerusuhan, atau gangguan ketertiban lainnya. Mereka aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi yang dapat mengancam keamanan umum. Dalam penanganan kenakalan remaja, Unit Samapta turut serta mencegah tawuran atau kejadian serupa dengan melakukan patroli mobile. Struktur organisasi yang terintegrasi memberikan dasar yang kokoh bagi Polsek Pasar Minggu dalam menangani holistik tantangan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Evaluasi terhadap koordinasi antar unit, penyuluhan masyarakat, dan respons terhadap kasus kenakalan remaja tetap menjadi salahsatu fokus kinerja Polsek Pasar Minggu.

Kurangnya personil di Polsek Pasar Minggu menghambat pelaksanaan patroli optimal, khususnya dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait tawuran. AKP Sulaimansyah, Kepala Unit Samapta, menyatakan bahwa jumlah personil yang terbatas kadang-kadang membatasi kemampuan mereka. Kapolsek Pasar Minggu menambahkan bahwa anggota Polsek hanya 67 orang, seharusnya lebih dari 70 orang. Keterbatasan ini menjadi tantangan serius, terutama dalam menangani kasus kenakalan remaja yang membutuhkan respons cepat.

Informasi palsu dapat menjadi hambatan serius dalam upaya identifikasi masalah tawuran oleh Polsek Pasar Minggu, mengakibatkan

penanganan yang tidak efektif. Contohnya, ketika masyarakat melaporkan tindakan meresahkan melalui telepon ke Polsek atau layanan 110 yang terhubung ke Polsek Pasar Minggu, namun setelah petugas kepolisian tiba di lokasi, nomor yang menghubungi Polsek tidak dapat dihubungi, dan ternyata tidak ada kejadian yang sesuai laporan. AKP Sulaimansyah, selaku Kepala Unit Samapta, sangat menyesalkan insiden semacam ini karena dianggap sebagai main-main dengan pihak kepolisian. Meskipun demikian, Polsek Pasar Minggu tetap harus sigap dan responsif terhadap laporan yang masuk, meskipun mungkin hanya informasi palsu, tanpa memilih-milih. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Tabel 1.1

Data Kenakalan Remaja terkait Penyalahgunaan Senjata Tajam untuk Tawuran di Wilayah Pasar Minggu Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Tindak Pidana	Jumlah
1.	2021	SAJAM (Senjata Tajam)	3
2.	2022	SAJAM (Senjata Tajam)	6
3.	2023	SAJAM (Senjata Tajam)	7

Sumber: Surat perintah penahanan Polri daerah Metro Jaya resor metropolitan Jakarta Selatan sektor Pasar Minggu

Tingkat kenakalan remaja terkait penggunaan senjata tajam untuk tawuran di Pasar Minggu mengalami peningkatan. meskipun kasus-kasus tersebut tidak sebanyak yang tercantum dalam artikel-artikel berita terkait

tawuran di Pasar Minggu. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya dukungan dari Tim Patroli Polres Metro Jakarta Selatan yang membantu dalam menangkap pelaku aksi tawuran. Meski demikian, meskipun terdapat dukungan dari Polres Jakarta Selatan, jumlah pelaku tawuran yang berhasil ditangkap oleh Polsek Pasar Minggu masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Keterlambatan kedatangan personil Polsek Pasar Minggu saat terjadi tawuran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya personil di Polsek Pasar Minggu. IPTU Mamay, selaku Kepala Unit Binmas, menjelaskan bahwa keterlambatan ini juga disebabkan oleh perubahan pola perilaku remaja dalam melakukan aksi tawuran. Saat ini, remaja cenderung menggunakan media sosial untuk berkoordinasi dan merencanakan pertemuan di waktu tertentu. Oleh karena itu, aksi tawuran seringkali terjadi secara tiba-tiba, dan Polsek Pasar Minggu baru dapat merespons setelah menerima laporan dari masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran polisi seringkali baru terjadi setelah aksi tawuran sudah dimulai atau bahkan sudah selesai, menciptakan tantangan dalam menangani situasi tersebut secara optimal. Upaya perbaikan, baik peningkatan personil maupun peningkatan koordinasi dengan masyarakat, menjadi penting untuk memastikan respons yang lebih cepat dan efektif dari pihak kepolisian.

Dalam menanggulangi meningkatnya kasus tawuran remaja, Polsek Pasar Minggu perlu meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan.

Hal ini sangat penting untuk memahami dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul di masyarakat. Polsek dapat lebih cepat merespons dan mencegah timbulnya kekerasan remaja. Peningkatan upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, yang bertujuan untuk membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif remaja. Melalui langkah-langkah ini, Polsek Pasar Minggu tidak hanya menciptakan rasa aman di masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk hubungan sosial yang lebih harmonis di lingkungan sekitar.

Kinerja Polsek Pasar Minggu dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran menjadi fokus utama mengatasi permasalahan serius ini. Pasar Minggu, sebagai lokasi yang rentan terhadap aksi tawuran remaja, menuntut perhatian khusus dari aparat kepolisian. Remaja, dalam proses pencarian jati dirinya, cenderung mencoba hal-hal baru tanpa pengawasan yang memadai dari orang dewasa. Kondisi ini dapat memicu perilaku negatif, terutama melibatkan diri dalam aksi tawuran. Keterlibatan remaja dalam kegiatan ini memiliki dampak serius terhadap keamanan masyarakat, serta perkembangan sosial dan psikologis mereka. Risiko kekerasan, kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, serta ancaman terhadap ketertiban dan keamanan di sekitarnya menjadi konsekuensi dari keterlibatan remaja dalam tawuran.

Dalam konteks ini, Polsek Pasar Minggu diharapkan untuk mengambil tindakan preventif dan represif guna mengatasi permasalahan

kenakalan remaja ini. Tindakan yang dilakukan oleh Polsek diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk menjaga keamanan masyarakat dan mendukung perkembangan sosial dan psikologis para remaja di Pasar Minggu.

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada kinerja Polsek Pasar Minggu dalam menangani permasalahan kenakalan remaja terkait tawuran. Melalui penelitian ini, akan dianalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan kenakalan remaja di wilayah Pasar Minggu dan langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Pasar Minggu dalam menanggulangi masalah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam mengenai kinerja Polsek Pasar Minggu dalam menangani tawuran remaja.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi praktis untuk pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja serta tawuran di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan lebih lanjut guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani permasalahan kenakalan remaja terkait tawuran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Polsek Pasar Minggu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait kualitas pelayanan yang dilakukan pada Polsek Pasar Minggu dengan didasarkan

pada aspek efisiensi, efektivitas, keadilan, daya Tanggap. Oleh karena itu, peneliti meneliti aspek tersebut dengan judul “Penanganan Kenakalan Remaja terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya personil dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait tawuran.
- b) Meningkatnya kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu.
- c) Waktu kedatangan personil Polsek Pasar Minggu yang kurang cepat saat terjadinya tawuran.
- d) Informasi palsu dapat mengakibatkan ketidaktepatan identifikasi masalah tawuran oleh Polsek, yang menghambat proses penanganan yang efektif.
- e) Kurang tegasnya tindak pidana hukum kepada anak dibawah umur.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu?
- b. Apa faktor yang terkait penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor terkait Polsek Pasar Minggu dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran

1.5 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memberikan sebuah manfaat. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Peningkatan Pemahaman tentang Penanganan Kenakalan Remaja terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu: Penelitian ini akan memberikan wawasan teoritis yang lebih baik tentang Penanganan Polsek Pasar Minggu dalam mengatasi masalah kenakalan remaja terkait tawuran.
- b. Pengembangan Penelitian Lanjutan: Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait. Informasi dan temuan dari penelitian ini dapat mendorong pengembangan teoritis dan penelitian lebih lanjut tentang kinerja kepolisian dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan bidang penelitian ini secara lebih mendalam dan menyeluruh.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Peningkatan Wawasan dan Pengalaman Penulis: Penelitian ini akan memberikan penulis pemahaman yang lebih mendalam serta pengalaman langsung terkait kinerja aparat kepolisian, khususnya Polsek Pasar Minggu, dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam memahami dan mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kemananan dan ketertiban di masyarakat.
- c. Kontribusi bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pemerintah dalam upaya mereka untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan melibatkan Polsek Pasar Minggu sebagai mitra strategis, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait aksi tawruan dan kenakalan remaja di wilayah tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Mengacu pada penelitian sebelumnya merupakan langkah penting untuk membandingkan dan mencari inspirasi baru dalam konteks penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya juga membantu peneliti dalam memposisikan penelitian mereka dan menunjukkan keaslian dari penelitian tersebut. Bagian ini mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan tema yang sedang saya teliti.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
Elok Prihatin	<i>Collaborative Governance</i> dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal	2020	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas Collaborative Governance dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. Fokus penelitian mencakup dua aspek utama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian

				ini tidak hanya berupaya memberikan pemahaman mendalam terhadap kolaborasi antarinstansi yang terlibat dalam penanggulangan kenakalan remaja, tetapi juga menguraikan dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya tersebut di Kabupaten Tegal.
Nurika Berliana	Peran Team Jaguar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Metro Depok	2020	Kualitatif	Tujuan penelitian ini melibatkan dua aspek utama. Pertama, penelitian bertujuan untuk memahami cara kerja Team Jaguar dalam menanggulangi tindak pidana penyakit masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resort Metro Depok. Aspek ini mencakup pemahaman mendalam terhadap strategi, prosedur, dan taktik yang digunakan oleh Team Jaguar dalam penanganan kasus tersebut. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas Team Jaguar dalam menanggulangi tindak pidana penyakit masyarakat di wilayah hukum yang sama. Evaluasi ini mencakup pengukuran sejauh mana upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh tim tersebut memberikan dampak positif dan berhasil dalam menekan kasus-kasus tindak pidana penyakit masyarakat.

Muhammad Gian Ikhsan, Endang Danial	<i>Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Problems of Juvenile Delinquency in Sukabumi District</i>	2020	Kualitatif	<p>Penelitian ini membahas bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa, tidak hanya dalam memberikan pengetahuan akademis. Disiplin di sekolah memiliki dampak langsung dalam mengurangi kenakalan remaja. Penelitian menekankan perlunya pendidikan holistik, termasuk kecerdasan emosional dan spiritual. Namun, sekolah tidak dapat mengatasi masalah ini sendirian dan membutuhkan kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan penegak hukum. Penelitian menyoroti efektivitas Tim Penanganan Kenakalan Pelajar di Sukabumi, yang bekerja sama dengan kepolisian untuk secara efektif menangani kenakalan remaja. Upaya kolaboratif ini memastikan lingkungan yang lebih aman bagi para siswa.</p>
Rosidah	Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Kenakalan Pelajar di Kabupaten Lampung Selatan	2021	Kualitatif	<p>Hasil diskusi menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani kenakalan pelajar dinilai cukup positif, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat, guru, dan pelajar sebagai pihak yang membantu dalam mengatasi kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian,</p>

				terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, seperti fasilitas kenyamanan masyarakat, yang dapat membantu guru dan siswa mengurangi tingkat kenakalan pelajar di lingkungan sekolah.
Angga Prayuda	Peran Kepolisian Sektor Simpang Kanan Dalam Menganggulangi Kenakalan Remaja	2021	Kualitatif	Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami peran Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi kenakalan remaja. Namun, meskipun Kegiatan seperti sosialisasi, patroli, dan penindakan telah dilakukan sesuai dengan tupoksi yang ada, ternyata belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari internal Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi kenakalan remaja.
Faisal Andico Syach Putra	Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Tawuran antar Pelajar	2022	Kualitatif	Penelitian di Polsek Margorejo, Kabupaten Pati, mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar menemukan beberapa kesimpulan. Kepolisian Sektor Margorejo menerapkan metode Pre-emptif, Pre-ventif, dan Represif dengan kegiatan seperti penyuluhan di sekolah, penempatan personil, koordinasi dengan pihak sekolah, memberikan pemahaman kepada orang tua, dan memanggil tersangka anak ke Linmas. Kendala yang

				dihadapi termasuk alat bukti yang belum mencukupi dan pelaku yang melarikan diri. Solusi melibatkan penyidikan lebih lanjut, pemecahan kelompok, kerjasama lintas kepolisian, dan penerapan Pasal 119 KUHP.
Chintya Tiara Andi Yanti, Anajeng Esri Edhi Mahanani	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak	2023	Kualitatif	Penegakan hukum tawuran anak di Surabaya menjadi prioritas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka menggunakan ancaman pidana, pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Faktor pemicu tawuran termasuk konflik keluarga, pengaruh teman, dan media sosial. Upaya penanganan melibatkan kunjungan sekolah, patroli gabungan, razia, dan penangkapan. Analisis data menunjukkan hambatan seperti kurangnya regulasi, koordinasi, dan resistensi masyarakat. Polres memperkuat koordinasi, memberikan edukasi, dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Fokus utama adalah pencegahan, koordinasi lebih baik, dan integrasi dengan masyarakat.
Muhammad Rafi Fadilah, Sri Hartini	Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih oleh Kepolisian Resor Sleman	2023	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan analisis data, Kepolisian Resor Sleman mengambil tindakan pre-emptif, preventif, dan represif untuk menanggulangi kejahatan jalanan klitih. Sat Binmas

				<p>melakukan sambang, pembinaan, dan penyuluhan sebagai upaya preemtif. Sat Samapta melakukan patroli rutin, KRYD, dan razia sebagai upaya preventif. Sat Reskrim, khususnya Unit I Jatanras, bertanggung jawab atas upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan. Hambatan termasuk keterbatasan anggaran, jadwal bentrok kegiatan preemtif, kurangnya antusias peserta didik, keterbatasan personel, wilayah luas, pengetahuan pelaku terhadap patroli, minimnya saksi, dan kesulitan bukti. Polres Sleman mengatasi hambatan dengan penggunaan anggaran yang efisien, penambahan personel, peningkatan patroli, koordinasi antar Polsek, peran intelijen yang lebih baik, dan peningkatan profesionalisme anggota.</p>
<p>Hefer Yarmud Pandie, Debi D.Ng. Fallo, Darius A. Kian</p>	<p>Impelementasi Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Kenakalan Remaja serta Hambatan-Hambatan yang Dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan</p>	<p>2023</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa peran Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam mengatasi kenakalan remaja adalah melalui penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan patroli pengawasan di wilayah-wilayah rawan. Namun, terdapat hambatan seperti sulitnya penyebaran informasi, kurangnya kesadaran hukum di</p>

				masyarakat, dan minimnya kepercayaan terhadap kepolisian dalam mencegah tindak kenakalan remaja.
--	--	--	--	--

Melalui penelitian sebelumnya banyak yang membahas terkait peran dan kinerja dari *stakeholder* untuk menanggulangi tawuran di masyarakat termasuk kalangan para remaja. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Faisal Andico Syach Putra pada tahun 2022 menyatakan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tawuran oleh remaja termasuk tawuran antar pelajar melibatkan metode pre-emptif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan mencakup penyuluhan di sekolah, penempatan personil Polsek, koordinasi dengan pihak sekolah, memberikan pemahaman kepada orang tua, dan pemanggilan tersangka anak ke linmas. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Andico Syach Putra untuk mengetahui peran kepolisian serta mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami fenomena penyalahgunaan sjaam di kalangan remaja, dengan menyoroti aspek-aspek tertentu yang relevan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada penanggulangan kenakalan remaja, penelitian saya ingin melihat seberapa jauh kinerja dari Polsek Pasar Minggu dalam menangani kenakalan remaja terkait tawuran.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi lokus yang hingga saat ini belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Lokasi yang saya pilih sebagai pusat penelitian adalah baru dalam konteks penelitian mengenai penyalahgunaan sajam oleh remaja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang permasalahan ini di lingkungan yang sebelumnya belum terungkap.

1.6.2 Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Administrasi Publik adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan yang digunakan untuk memahami dan memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik di dalam konteks administrasi pemerintahan. Definisi administrasi publik merupakan hasil usaha yang melibatkan dua orang atau lebih di dalam ranah kerja publik yang terdiri dari tiga cabang, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Henry, dalam Pasolong (2008:8), menekankan bahwa administrasi publik adalah perpaduan kompleks antara teori dan praktik. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas pemahaman mengenai peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta mendorong kebijakan

publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Perkembangan administrasi publik sebagai disiplin telah melalui proses yang rumit. Banyak literatur yang menjelaskan perjalanan perkembangan administrasi publik ini melalui pergeseran paradigma. Nicholas Henry dalam Pasolong (2014:28) mengenali adanya lima paradigma dalam administrasi publik, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Paradigma 1 dalam administrasi publik dikenal sebagai "Dikotomi politik-administrasi" (1900-1926). Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Dalam bukunya yang berjudul "*Politics and Administration*", Goodnow menyatakan bahwa negara memiliki dua fungsi utama, yaitu politik dan administrasi. Politik berkaitan dengan pembuatan kebijakan atau ekspresi kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Sebelum buku Goodnow terbit, Woodrow Wilson telah menulis karya yang serupa. Paradigma 1 menekankan pada lokus, yaitu di mana administrasi publik seharusnya berada. Menurut pandangan Goodnow dan pengikutnya, administrasi publik harus berlokus pada birokrasi pemerintah, tanpa mempersoalkan fokus spesifiknya.
2. Paradigma 2 dalam administrasi publik ditandai dengan

terbitnya buku "*Principles of Public Administration*" karya Willoughby pada tahun 1927. Pada periode ini, penelitian administrasi publik berkembang pesat, diikuti dengan pembukaan program administrasi publik di universitas dan pendirian asosiasi profesional dengan dukungan The Rockefeller Philanthropies. Ini merupakan puncak dari pengakuan teoritis administrasi publik, baik di pemerintahan maupun industri, pada periode 1930-an hingga awal 1940-an. Paradigma ini berfokus pada "fokus" administrasi publik, yaitu keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip administrasi, seperti POSDCoRB yang diajukan oleh Gulick & Urwick, dan prinsip-prinsip birokrasi dari Max Weber, dianggap berlaku di semua setting administrasi tanpa batasan kultural.

3. Paradigma 3, administrasi publik kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari kritikan-kritikan terhadapnya. Hal ini menyebabkan perubahan definisi lokus administrasi publik menjadi terfokus pada birokrasi pemerintah dan melepaskan aspek yang terkait dengan fokus. Periode ini ditandai dengan kurangnya kerangka kerja intelektual dalam studi administrasi publik dan dianggap mengalami kemerosotan spiral. Administrasi publik hanya mendapat sedikit perhatian dari jurnal ilmu

politik pada waktu itu.

4. Paradigma 4, administrasi publik mencoba mencari alternatif lain untuk diakui sebagai ilmu, mengingat posisinya yang dianggap sebagai "warga kelas dua" dalam ilmu politik. Opsi yang diambil adalah memasuki bidang manajemen, yang menyediakan fokus tetapi tidak mengidentifikasi setting di mana keahlian tersebut harus diterapkan. Pembentukan jurnal *Administrative Science Quarterly* pada tahun 1956 menekankan bahwa perbedaan antara administrasi publik, swasta, dan nirlaba adalah salah dan bahwa administrasi adalah administrasi tanpa memandang sektornya.
5. Paradigma 5, administrasi publik berhasil memisahkan diri dari bidang manajemen dan ilmu politik. Kepercayaan diri terhadap administrasi publik terus meningkat pada akhir tahun 1960-an, dan pada tahun 1970, terjadi pemisahan yang jelas. Luther Gulick menulis artikel yang menegaskan bahwa administrasi publik bukanlah bagian dari manajemen maupun ilmu politik. Pembentukan *The National Association of Schools of Public Affairs and Administration* (NASPAA) pada tahun 1970 menjadi tonggak penting yang menandai pengakuan administrasi publik sebagai bidang ilmu tersendiri. NASPAA memberikan akreditasi kepada banyak universitas dan sekolah tinggi yang memiliki

program administrasi publik, dan sejak itu administrasi publik diakui secara luas sebagai bidang ilmu yang memiliki fokus pada masalah-masalah publik, kepentingan publik, teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan political- economy.

2. Manajemen Publik

Manajemen Publik, menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008: 93), diartikan sebagai usaha seseorang untuk mengemban tanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi dan memanfaatkan sumber daya (baik manusia maupun mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Perspektif Overman (dalam Keban (2004: 85) menyatakan bahwa manajemen publik bukanlah konsep "*scientific management*" secara langsung, meskipun tetap mendapat pengaruh signifikan darinya. Lebih lanjut, manajemen publik bukanlah semata "*policy analysis*" atau administrasi publik, melainkan mencerminkan dinamika hubungan antara orientasi politik kebijakan dengan unsur lainnya. Secara keseluruhan, manajemen publik merupakan studi interdisipliner yang mencakup aspek-aspek umum organisasi. Ini melibatkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, serta pengelolaan sumber daya

manusia, keuangan, fisik, informasi, dan aspek politik di sisi lain.

3. Kinerja Organisasi

Pengertian kinerja organisasi dapat diartikan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pandangan Wibawa dan Atmosudirdjo dalam Pasolong (2011: 176). Menurut mereka, kinerja organisasi mencakup efektivitas organisasi secara menyeluruh, memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh setiap kelompok terkait melalui usaha-usaha sistemik, dan terus-menerus meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai kebutuhan tersebut secara efektif. Dengan kata lain, kinerja organisasi adalah upaya menuju efektivitas global dalam memenuhi kebutuhan setiap kelompok, melalui langkah-langkah yang terorganisir dan terus menerus meningkatkan kemampuan organisasi.

Dwiyanto (2006: 52) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain:

- a. Efisiensi, Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

- b. Efektivitas, Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
- c. Keadilan, Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
- d. Daya Tanggap, Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap.

4. Faktor yang Terkait Kinerja Organisasi

Banyak Faktor yang terkait kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky (dalam Hessel (2005 – 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut;
- b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi;
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan;
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan;
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi;
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya

Disisi lain Soesilo (dalam Hessel, (2005: 180), juga menjelaskan bahwa kinerja suatu organisasi berkaitan adanya faktor-faktor berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi;
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasional Konsep

1.7.1 Kinerja Organisasi

Fenomena penelitian pada penelitian ini menggunakan konsep kinerja organisasi yang didasarkan pada fokus yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan 4 indikator kinerja organisasi di Polsek Pasar Minggu. Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana Polsek Pasar Minggu dapat efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah, menangani, dan mengatasi kasus kenakalan remaja terkait tawuran. Berikut tabel fenomena yang akan digunakan dalam penelitian Penanganan Kenakalan Remaja terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu:

Tabel 1.3

Tabel Operasional Konsep Kinerja Organisasi

Fokus Penelitian	Gejala	Sub-Gejala
Pelaksanaan Penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none">1) Pemanfaatan personel Polsek Pasar Minggu untuk menangani kasus kenakalan remaja terkait tawuran.2) Inovasi program untuk menangani kenakalan remaja terkait tawuran.
	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none">1) Kerjasama antara Polsek Pasar Minggu dengan masyarakat untuk menangani kasus kenakalan remaja.2) Tingkat kasus kenakalan remaja setelah tindakan

		oleh Polsek Pasar Minggu.
	Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesetaraan dan tanpa diskriminasi dalam penanganan kenakalan remaja oleh Polsek Pasar Minggu. 2) Keadilan dalam penegakan hukum terhadap remaja yang terlibat tawuran.
	Daya Tanggap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan waktu dalam menanggapi adanya kasus kenakalan remaja terkait tawuran. 2) Respon cepat dan kepedulian dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait tawuran oleh remaja.

1.7.2 Faktor yang Terkait

Kelancaran kinerja Polsek Pasar Minggu pasti akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor terkait yang memiliki dampak pada pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor ini mencakup elemen-elemen yang memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja. Dalam konteks ini, faktor yang terkait penanganan keanakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu mengacu pada elemen-elemen atau kondisi yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan layanan kepolisian yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah tabel 1.4 tentang fenomena Faktor Terkait

dengan Kinerja Polsek Pasar Minggu.

Tabel 1.4

Tabel Operasional Konsep Faktor yang Terkait Kinerja Organisasi

Fokus Penelitian	Gejala	Sub-Gejala
Faktor yang terkait Penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu	Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi penanganan tawuran. 2) Peralatan kerja Polsek Pasar Minggu untuk menangani kenakalan remaja.
	Kualitas Input	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi dan data berkualitas dalam mengidentifikasi kenakalan remaja. 2) Sumber daya manusia dan alat berkualitas untuk penanganan yang efektif.
	Kualitas lingkungan fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polsek Pasar Minggu menciptakan lingkungan fisik aman penanganan kenakalan remaja. 2) Penataan ruangan dan kebersihan mendukung kenyamanan berinteraksi dengan masyarakat.

	Budaya Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sikap dan perilaku anggota Polsek Pasar Minggu terhadap kasus kenakalan remaja. 2) Kesesuaian pola kerja dengan tujuan dan standar organisasi.
	Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan pimpinan mengarahkan anggota Polsek Pasar Minggu sesuai standar organisasi. 2) Keterlibatan pimpinan dalam membimbing tim penanganan kasus.
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem kompensasi yang meningkatkan motivasi anggota Polsek Pasar Minggu. 2) Praktek pengelolaan sumber daya manusia, termasuk promosi dan penghargaan, mendukung kinerja organisasi dalam menangani kenakalan remaja.

1.8 Argumen Penelitian

Polsek Pasar Minggu sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polsek memiliki tanggung jawab besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan tugas pokok kepolisian, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu dinilai masih belum mencapai standar yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam perspektif Wibawa dan Atmosudirdjo (dalam Pasolong, 2011:176), kinerja organisasi, termasuk Polsek, harus mencakup efektivitas secara menyeluruh, memenuhi kebutuhan setiap kelompok terkait, dan terus-menerus meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada, khususnya dalam konteks penanggulangan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek penegakan hukum, penelitian ini akan

menggali sejauh mana penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu. Analisis faktor-faktor terkait akan menjadi fokus utama penelitian ini, membahas pelaksanaan penanganan Polsek Pasar Minggu dalam menanggapi dan mencegah tawuran remaja. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh Polsek Pasar Minggu dalam menangani permasalahan ini.

Harapan penulis adalah bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja Polsek Pasar Minggu, tetapi juga memberikan wawasan yang penting bagi pihak terkait dalam memperbaiki pencegahan dan penanganan kenakalan remaja terkait tawuran. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat Pasar Minggu, sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh undang-undang serta judul penelitian ini.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian dapat mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi dari keduanya. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif menekankan pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Sementara itu, metode penelitian kualitatif fokus pada suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di lapangan yang diperoleh peneliti itu sendiri. Penggunaan metode penelitian yang tepat sangat penting dalam memastikan keabsahan dan kehandalan hasil penelitian.

Pada penelitian ini berfokus pada penanganan kenakalan remaja terkait tawuran oleh Polsek Pasar Minggu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya menyajikan data dan informasi secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran bagaimana Polsek Pasar Minggu mengatasi problematika terkait tawuran yang terjadi di kota besar, di mana kasus tawuran remaja dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

1.9.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Sujarweni (2014: 73) lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan. Menentukan lokasi penelitian merupakan

tahap penting dalam penelitian kualitatif. Ini melibatkan penentuan lokasi, objek, dan tujuan penelitian untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Polsek Pasar Minggu yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Polsek Pasar Minggu merupakan unit terkecil dari Polri, namun berada di kecamatan yang merupakan salah satu bagian dari kota mega metropolitan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2007: 152), peran subjek penelitian memiliki signifikansi penting dalam konteks penelitian. Subjek penelitian perlu diorganisir dengan baik sebelum peneliti dapat memulai pengumpulan data. Subjek penelitian dapat mencakup individu, objek, atau lembaga (organisasi). Dengan kata lain, subjek penelitian merujuk pada pihak yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk melakukan pengumpulan data mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Proses pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan melalui teknik *sampling*, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian dalam penelitian empiris. Dalam konteks penelitian empiris, *sampling* diartikan sebagai langkah-langkah dalam pemilihan atau penentuan sampel.

Sesuai dengan pendapat di atas, peneliti melakukan penelitian di Polsek Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini penulis mengambil subjek penelitian berjumlah tujuh orang yang diharapkan bisa memberi informasi terkait

dengan penanganan kenakalan remaja, yaitu:

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Pasar Minggu	Penanggung-jawab tertinggi di Polsek Pasar Minggu	1 orang
2.	Kepala unit Pembina Masyarakat (Binmas) Polsek Pasar Minggu	Penanggung-jawab unit Binmas yang melakukan tindakan preventif	1 orang
3.	Kepala unit Satuan Pengamanan Ketertiban Ketertiban (Samapta) Polsek Pasar Minggu	Penanggung-jawab unit Samapta yang melakukan tindakan represif	1 orang
4.	Kepala Sekolah di Wilayah Hukum Polsek Pasar Minggu	Pihak yang bekerja sama dengan Polsek Pasar Minggu	1 orang
5.	Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Wilayah Hukum Polsek Pasar Minggu	Pihak yang bekerja sama dengan Polsek pasar minhhu	1 orang
6.	Remaja di Wilayah Hukum Polsek Pasar Minggu	Masyarakat di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu	1 orang
7.	Orangtua di Wilayah Hukum Polsek Pasar Minggu	Masyarakat di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu	1 orang

1.9.4 Jenis Data

Sugiyono (2017), menyoroti pentingnya memahami jenis data untuk memastikan kecocokan metodologi penelitian. Pemilihan metode yang tepat, sesuai dengan jenis data, diakui sebagai kunci untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Data ini akan membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan remaja terkait tawuran di Pasar Minggu dan kinerja Polsek Pasar Minggu dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan atau intervensi yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian atau analisis suatu topik. Ini bisa berupa informasi tertulis, data statistik, wawancara, survei, rekaman audio atau video, dan sumber lainnya, sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau eksperimen, sementara sumber data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, atau data statistik (Sugiyono, 2017).

1) Data Primer

Menurut Sujarweni (2014: 73), data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, panel, atau wawancara peneliti dengan informan. Data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sumber data primer adalah pihak yang memberikan data langsung kepada pengumpul. Menurut Umar (2013: 42) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”

Data primer penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dengan kepala Polsek Pasar Minggu, anggota Polsek Pasar Minggu, serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan Polsek Pasar Minggu.

2) Data Sekunder

Menurut Indrianto dan Supomo (2013: 143) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Contoh data sekunder dalam penelitian ini misalnya arsip, dokumen, laporan, buku, jurnal, media sosial resmi Polsek Pasar Minggu

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

1.9.6.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2018: 229), observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek-objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman tentang kinerja Polsek Pasar Minggu dalam menangani kenakalan remaja, khususnya terkait tawuran di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu.

1.9.6.2 Wawancara

Sanjata (2013: 263) menyatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan teknik penelitian yang dilakukan melalui dialog, baik secara langsung (*luring*) maupun melalui saluran media (*daring*) tertentu, antara pewawancara dan yang diwawancarai sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur, yang dilaksanakan dengan menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh informan terkait. Wawancara dalam konteks penelitian ini berlangsung dalam format tanya jawab, diarahkan kepada petugas kepolisian dan pihak-pihak terkait dengan kepolisian di Polsek Pasar Minggu.

1.9.6.3 Dokumentasi

Sugiyono (2009: 329) menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam konteks teknik pengumpulan data, dokumen berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono (2017: 133) menyatakan bahwa analisis data kualitatif melibatkan aktivitas yang bersifat interaktif dan berlangsung secara kontinu hingga selesai, yaitu ketika data telah mencapai tingkat kejenuhan. Proses analisis data melibatkan tiga kegiatan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data-data tersebut dapat berasal dari wawancara, survei, observasi, atau dokumen terkait. Sugiyono (2017: 135) mengungkapkan bahwa mereduksi data berarti melakukan rangkuman, pemilihan, dan penekanan pada elemen-elemen kunci, serta menfokuskan pada aspek-aspek yang signifikan. Dalam proses ini, pencarian tema dan pola juga menjadi bagian penting.

2. Penyajian Data

Dalam konteks ini, Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 137) menyatakan bahwa format yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif. Di mana data yang telah diolah dan dikategorikan disajikan dalam berbagai format, seperti narasi, tabel, grafik, atau visualisasi lainnya

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah kunci dalam analisis dan interpretasi data. Kesimpulan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang data yang telah diolah dan disajikan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah tanpa dukungan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan (Sugiyono, 2017: 141).

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Pemeriksaan kualitas data, selain bertujuan untuk membantah tuduhan ketidakilmiahan dalam penelitian kualitatif, juga merupakan elemen integral dalam pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320).

Evaluasi kualitas data dilakukan untuk memastikan keilmiahan penelitian dan menguji validitas data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup *credibility*, *transferability*,

dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270).

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disajikan dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang tidak diragukan.

2. *Transferability* (transferabilitas.)

Transferability dalam penelitian kualitatif mengacu pada validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dengan akurat pada populasi di mana sampel penelitian diambil (Sugiyono, 2007: 276).

3. *Dependability* (Dependabilitas)

Reliabilitas Keandalan atau suatu penelitian, dengan kata lain, ditunjukkan oleh konsistensi hasil yang diperoleh dari beberapa percobaan yang dilakukan. Suatu penelitian dianggap memiliki dependabilitas atau reliabilitas jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang serupa akan menghasilkan hasil yang serupa juga.

4. *Confirmability* (Konfirmabilitas)

Konfirmabilitas menekankan pada kemampuan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi data dengan menggunakan referensi atau sumber data tambahan. Dengan kata lain, data yang berkualitas harus dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya.